

## ETIKA KEWARGANEGARAAN DIGITAL DAN ANCAMAN DEEPPAKE: ANALISIS KASUS VIDEO PIDATO BAHASA MANDARIN TOKOH PUBLIK DI INDONESIA

Dara Ayodya Santoso<sup>1</sup>, Elok Wilujeng Hanifatuz Zahra<sup>2</sup>, Giar Anita Ningrum<sup>3</sup>,  
Ratulafika Aisya Shofiyatudin<sup>4</sup>, Annisa Rahmadyah<sup>5</sup>, Aida Sabilillah<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Negeri Malang

([dara.ayodya.2507116@students.um.ac.id](mailto:dara.ayodya.2507116@students.um.ac.id)<sup>1</sup>, [elok.wilujeng.2507116@students.um.ac.id](mailto:elok.wilujeng.2507116@students.um.ac.id)<sup>2</sup>,  
[giar.anita.2507116@students.um.ac.id](mailto:giar.anita.2507116@students.um.ac.id)<sup>3</sup>, [ratulafika.aisya.2507116@students.um.ac.id](mailto:ratulafika.aisya.2507116@students.um.ac.id)<sup>4</sup>,  
[annisa.rahmadyah.2507116@students.um.ac.id](mailto:annisa.rahmadyah.2507116@students.um.ac.id)<sup>5</sup>,  
[aida.sabilillah.2507116@students.um.ac.id](mailto:aida.sabilillah.2507116@students.um.ac.id)<sup>6</sup>)

### Abstrak

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) menimbulkan ancaman terhadap etika kewarganegaraan digital melalui penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik, terutama *deepfake*. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman manipulasi video berbasis AI terhadap etika kewarganegaraan digital dan pentingnya literasi digital melalui kasus video Presiden Joko Widodo berpidato bahasa Mandarin. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari video *deepfake*, media sosial, jurnal ilmiah, dan berita. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital dan kajian pustaka, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deepfake* dapat memengaruhi kepercayaan publik dan meningkatkan penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, etika digital, pengawasan media sosial, dan regulasi pemerintah untuk mencegah penyebaran konten manipulatif berbasis AI.

**Kata Kunci:** *Artificial Intelligence; Deepfake; Literasi Digital; Etika Digital; Disinformasi.*

### Abstract

*The development of Artificial Intelligence (AI) technology poses a threat to the ethics of digital citizenship through the spread of disinformation and manipulation of public opinion, especially deepfakes. This study aims to analyze the threat of AI-based video manipulation to digital citizenship ethics and the importance of digital literacy through the case of a video of President Joko Widodo giving a speech in Chinese. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data sources were obtained from deepfake videos, social media, scientific journals, and news. Data collection was carried out through digital observation and literature review, while data analysis used qualitative descriptive analysis with source triangulation. The results of the study show that deepfakes can affect public trust and increase the spread of fake news. Therefore, strengthening digital literacy, digital ethics, social media surveillance, and government regulations is needed to prevent the spread of AI-based manipulative content.*



**Keywords:** *Artificial Intelligence; Deepfake; Digital Literacy; Digital Ethics; Disinformation*

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi di ruang publik digital. Kehadiran teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) semakin mempercepat transformasi tersebut melalui berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas manusia. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif. Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang kini menjadi perhatian global adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi manipulasi audio dan video berbasis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan rekaman visual maupun suara palsu dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap objek aslinya. Teknologi ini menggunakan metode *deep learning* dan jaringan saraf tiruan untuk memodifikasi ekspresi wajah, suara, bahkan gerak tubuh seseorang sehingga tampak realistis dan sulit dibedakan dari konten asli (Putu et al., n.d. 2024). Fenomena *deepfake* menjadi ancaman serius dalam kehidupan digital karena dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks, propaganda politik, manipulasi opini publik, hingga pencemaran nama baik. Kemampuan AI

dalam menghasilkan konten visual yang tampak autentik menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan rekayasa digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan etika dan literasi digital masyarakat. Menurut penelitian dalam Jurnal Pendidikan Tambusai, penyalahgunaan AI dalam bentuk *deepfake* berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media digital serta memunculkan krisis kebenaran informasi di masyarakat (Puspita, n.d.).

Salah satu kasus manipulasi video berbasis AI yang menjadi perhatian publik di Indonesia adalah beredarnya video Presiden Joko Widodo yang tampak berpidato menggunakan bahasa Mandarin secara fasih. Video tersebut viral di media sosial dan memunculkan berbagai opini serta spekulasi di tengah masyarakat. Setelah dilakukan penelusuran, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi teknologi *deepfake*. Video asli diketahui berasal dari pidato Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian dimodifikasi



menggunakan AI sehingga terlihat seolah-olah beliau berbicara dalam bahasa Mandarin (Chairani et al., 2022). Kasus tersebut menunjukkan bahwa teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi tertentu yang berpotensi memicu sentimen politik, sosial, maupun etnis di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, isu yang berkaitan dengan Tiongkok dan bahasa Mandarin sering kali menjadi isu sensitif yang mudah memancing perdebatan publik. Oleh karena itu, penyebaran video manipulatif semacam ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi objek manipulasi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kualitas demokrasi digital.

Fenomena tersebut memperlihatkan masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dalam memahami perkembangan teknologi AI dan ancaman disinformasi di media sosial (Mutmainnah et al., 2024a). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman manipulasi video berbasis AI terhadap etika kewarganegaraan digital melalui studi kasus video pidato bahasa Mandarin Presiden Joko Widodo. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak penyebaran *deepfake* terhadap kepercayaan publik, penyebaran

disinformasi, serta pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika digital dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga ruang informasi digital yang sehat, kritis, dan demokratis. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dari Mike Ribble yang menekankan perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori literasi digital yang menjelaskan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi yang beredar di media digital. Kedua teori tersebut relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat menghadapi ancaman manipulasi informasi berbasis AI secara kritis dan etis. Dengan demikian, penelitian mengenai manipulasi video berbasis AI ini menjadi penting sebagai upaya memahami tantangan baru etika digital di era kecerdasan buatan.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini



bertujuan memahami fenomena manipulasi video berbasis *Artificial Intelligence* (AI) serta dampaknya terhadap etika kewarganegaraan digital dan penyebaran disinformasi di masyarakat. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis fenomena *deepfake* pada kasus video pidato Presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin yang viral di media sosial (Mutmainnah et al., 2024a). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan terhadap video *deepfake* yang beredar di media sosial serta tanggapan masyarakat di berbagai platform digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dokumen resmi pemerintah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *deepfake*, literasi digital, etika kewarganegaraan digital, dan penggunaan AI dalam media (Az-zahra, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai video manipulasi AI Presiden Joko Widodo dan klarifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebenaran video tersebut. Adapun studi literatur

dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis penelitian mengenai ancaman *deepfake* terhadap masyarakat digital (Bagas Saputra, 2026).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori kewarganegaraan digital dan teori literasi digital. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana manipulasi video berbasis AI dapat memengaruhi kepercayaan publik, memicu disinformasi, serta menunjukkan pentingnya etika dan literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan. (Mustika & Sari, 2020a; Suryanti Suryanti, 2022). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, berita resmi, dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai ancaman manipulasi video berbasis AI terhadap etika kewarganegaraan digital di Indonesia (Dyah et al., 2025).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan



## 1. Ancaman Manipulasi Video Berbasis AI terhadap Etika Kewarganegaraan Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya teknologi *deepfake*, telah menjadi ancaman baru yang serius dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk memanipulasi wajah, suara, dan gerakan seseorang sehingga menghasilkan video yang tampak asli dan sangat sulit dibedakan dari konten nyata. Kemampuan teknologi *deepfake* yang semakin canggih membuat penyalahgunaannya semakin mudah dilakukan oleh berbagai pihak dengan motif yang beragam, mulai dari penyebaran hoaks, propaganda politik, penipuan digital, hingga pencemaran nama baik tokoh publik maupun individu biasa. Menurut Arifina dkk., perkembangan media digital yang tidak disertai kemampuan literasi dan pengecekan fakta dapat meningkatkan penyebaran hoaks serta informasi menyesatkan di masyarakat (Setya Arifina et al., 2024).

Dalam konteks etika kewarganegaraan digital, fenomena manipulasi berbasis video AI menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum diimbangi dengan

kesadaran moral dan kemampuan literasi digital yang memadai di kalangan masyarakat. Banyak pengguna media sosial masih mudah percaya dan langsung menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sikap impulsif dalam menerima dan menyebarkan informasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten sensasional sehingga konten manipulatif berpotensi menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan informasi yang akurat. Kondisi ini dapat memicu munculnya disinformasi, konflik sosial, dan penurunan kepercayaan publik terhadap informasi digital secara keseluruhan. Penelitian Utin Kasma dkk. menjelaskan bahwa literasi digital dan etika bermedia sosial sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan media digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab di era perkembangan teknologi AI (Kasma, n.d.).

Salah satu contoh nyata di Indonesia yang menjadi perhatian luas adalah kasus video Presiden Joko Widodo yang tampak berpidato menggunakan bahasa Mandarin. Video tersebut sempat viral di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam spekulasi politik di tengah masyarakat, termasuk dugaan mengenai kedekatan diplomatik tertentu yang dianggap kontroversial.



Setelah dilakukan klarifikasi oleh pihak berwenang dan tim pemeriksa fakta, video tersebut diketahui merupakan hasil manipulasi AI atau *deepfake* yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini publik. Kasus ini memperlihatkan secara nyata bahwa teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun narasi tertentu dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik maupun sosial yang sedang berkembang. Fenomena tersebut menegaskan bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi manipulatif yang beredar di media sosial (Ni'mah et al., 2026).

Lebih jauh, ancaman manipulasi video berbasis AI juga berdampak pada meningkatnya risiko penipuan digital dan penyalahgunaan identitas di ruang media sosial. Teknologi *deepfake* tidak hanya digunakan untuk memanipulasi citra tokoh publik, tetapi juga dapat digunakan untuk menipu individu biasa dengan memalsukan identitas seseorang dalam video panggilan, iklan palsu, atau konten promosi yang menyesatkan. Dampak psikologis dari paparan konten manipulatif semacam ini juga tidak dapat diabaikan, karena dapat menimbulkan rasa cemas, ketidakpercayaan, dan kebingungan di kalangan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar

dan salah. Oleh karena itu, literasi digital menjadi aspek yang sangat penting agar masyarakat mampu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Dengan adanya pemahaman yang kuat mengenai etika digital, masyarakat diharapkan dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan turut menjaga ruang digital agar tetap sehat serta demokratis (Budiarta et al., 2025).

## 2. Upaya Pemerintah, Platform Media Sosial, dan Masyarakat dalam Mencegah Penyebaran Video Manipulasi Berbasis AI (*Deepfake*)

Penyebaran video manipulasi berbasis *Artificial Intelligence (deepfake)* menjadi tantangan besar di era digital karena dapat memicu disinformasi, propaganda, dan penurunan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar di media sosial. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban manipulasi, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas sosial dan politik suatu negara secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran konten manipulatif tersebut. Upaya pencegahan yang terkoordinasi dengan baik sangat penting agar ruang digital tetap sehat, aman, dan



tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat luas (Mutmainnah et al., 2024).

Pemerintah memiliki peran sentral dalam membuat regulasi dan kebijakan terkait penggunaan teknologi AI serta penyebaran informasi digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya klarifikasi informasi hoaks, pengawasan konten digital yang beredar di platform media sosial, serta peningkatan program literasi digital masyarakat melalui berbagai inisiatif nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerangka aturan hukum terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake* agar pelaku manipulasi digital dapat diberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini agar dapat menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital yang semakin beragam dan canggih. Penelitian Chairani dkk. menjelaskan bahwa penyalahgunaan aplikasi *deepfake* menimbulkan berbagai bentuk kejahatan digital sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi

masyarakat dari dampak manipulasi teknologi AI (Chairani et al., 2022).

Selain pemerintah, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurangi penyebaran video *deepfake* di ruang digital. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook perlu terus meningkatkan sistem deteksi otomatis terhadap konten manipulatif dengan memanfaatkan teknologi AI yang mereka miliki. Ironisnya, teknologi yang sama yang digunakan untuk membuat *deepfake* juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksinya, sehingga investasi platform dalam pengembangan alat deteksi konten palsu menjadi sangat penting. Platform digital juga dapat menerapkan kebijakan pemberian label peringatan pada konten yang terindikasi hasil manipulasi, serta menghapus atau membatasi distribusi konten yang terbukti menyesatkan atau berpotensi berbahaya bagi masyarakat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara konsisten dan transparan agar kepercayaan pengguna terhadap platform dapat terjaga. Penelitian mengenai keamanan digital menunjukkan bahwa pengawasan aktif dari platform media sosial sangat penting untuk membatasi penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital (Kasma, n.d.).



Di samping upaya teknis dan regulasi, edukasi publik juga merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam strategi pencegahan penyebaran *deepfake*. Kampanye kesadaran publik yang masif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk membantu masyarakat memahami cara mengenali konten manipulatif, menggunakan alat verifikasi fakta, dan melaporkan konten yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun ekosistem informasi digital yang sehat menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman *deepfake* di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, diharapkan penyebaran konten manipulatif berbasis AI dapat ditekan secara signifikan demi terciptanya ruang digital yang lebih aman dan terpercaya.

### 3. Peran Masyarakat dalam Menerapkan Etika Kewarganegaraan Digital untuk Menghadapi Penyebaran Konten Manipulatif Berbasis AI

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang pesat menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran etika yang tinggi dalam menggunakan media digital sehari-hari. Penyebaran konten manipulatif seperti *deepfake* dapat

memengaruhi opini publik secara masif, menimbulkan hoaks yang meresahkan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak dapat sekadar menjadi konsumen informasi yang pasif, melainkan harus berperan aktif sebagai agen perubahan yang turut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan ekosistem informasi digital. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan etika kewarganegaraan digital dengan cara menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Penguatan etika digital diperlukan agar masyarakat mampu memahami dampak penggunaan teknologi terhadap kehidupan sosial di era digital yang semakin kompleks (Iman Pasu Purba, 2024; Mustika & Sari, 2020).

Salah satu bentuk nyata dari peran masyarakat adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi digital dan mengembangkan pola pikir kritis terhadap informasi yang beredar di internet. Literasi digital dalam konteks ini tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mengevaluasi keandalan sumber informasi, memahami konteks suatu berita, serta melakukan



verifikasi sebelum membagikan konten kepada orang lain. Masyarakat perlu terbiasa menggunakan platform pengecekan fakta seperti Turnbackhoax.id, Cekfakta.com, atau layanan verifikasi lainnya yang tersedia untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diterima. Sikap kritis dan kehati-hatian ini menjadi sangat penting mengingat teknologi *deepfake* kini mampu menghasilkan video manipulatif yang terlihat sangat nyata sehingga dapat dengan mudah menyesatkan masyarakat yang tidak waspada. Literasi digital yang kuat membantu masyarakat lebih cermat dalam menyaring informasi dan memahami penggunaan media digital secara tepat dan bertanggung jawab (Naila et al., 2021; Suryanti, 2022).

Selain meningkatkan literasi digital, masyarakat juga perlu secara aktif menjaga etika komunikasi di ruang digital dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, maupun konten manipulatif dalam bentuk apa pun. Setiap individu sebagai pengguna media sosial harus memiliki kesadaran penuh bahwa setiap tindakan dan unggahan di ruang digital memiliki dampak nyata terhadap orang lain dan terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Prinsip etika komunikasi ini mencakup sikap menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi

yang belum terverifikasi, serta bersedia melaporkan konten yang dianggap melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dalam konteks kewarganegaraan digital, perilaku bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan kondusif bagi semua pihak.

Program pendidikan literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum nasional perlu diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah. Dengan membangun fondasi budaya digital yang kuat dan beretika sejak dini, diharapkan penyebaran konten manipulatif berbasis AI, termasuk *deepfake*, dapat diminimalkan secara signifikan, sehingga ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi ekosistem informasi yang sehat, demokratis, dan bermartabat (Dyah Permata Sari, 2025; Pendidikan et al., 2025).

#### D. Penutup

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya teknologi *deepfake*, membawa tantangan baru dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Teknologi ini mampu memanipulasi video dan audio sehingga menghasilkan



konten yang tampak nyata dan sulit dibedakan dari informasi asli. Penyalahgunaan *deepfake* dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, propaganda politik, pencemaran nama baik, hingga memengaruhi opini publik. Fenomena video Presiden Joko Widodo yang dimanipulasi seolah-olah berpidato menggunakan bahasa mandarin menunjukkan bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk membangun narasi tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disinformasi di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan kesadaran etika masyarakat dalam menggunakan media digital. Dalam *perspektif* kewarganegaraan digital, masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki sikap kritis, bertanggung jawab, dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Rendahnya kemampuan verifikasi informasi dapat menyebabkan masyarakat mudah percaya dan menyebarkan konten manipulatif tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mencegah

penyebaran *deepfake* dan disinformasi digital. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan edukasi literasi digital, sedangkan platform media sosial harus meningkatkan pengawasan dan sistem deteksi terhadap konten manipulatif berbasis AI. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam menerapkan etika kewarganegaraan digital dengan selalu memverifikasi informasi, menggunakan media sosial secara bijak, serta tidak menyebarkan konten yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, penguatan literasi digital dan etika digital menjadi langkah penting untuk menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan demokratis di era perkembangan kecerdasan buatan.

## E. Daftar Pustaka

- Az-zahra, F. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi Rouli Br Lumbanbatu Thereza Dwi Ningrum Siburian Triya Anggraini. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2>
- Bagas Saputra, M. A. A. G. N. S. A. S. S. (2026). *107.+Pembaruan+Hukum+Digital+Eti*



- ka+Kecerdasan+Buatan+Berbasis+P+8  
18-824.
- Budiarta, K., Diaz, R. A. N., Pramana, D., Pratami, N. W. C. A., & Suputra, K. A. (2025). Transformasi Desa Nyitdah Menuju Mandiri Digital Dengan Literasi Digital Pada Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 9–20. <https://doi.org/10.30812/adma.v6i1.4857>
- Chairani, M. A., Pradhana, A. P., & Purnama, T. Y. (2022). The Urgency Of Developing Law As A Legal Basis For The Implementation Of Artificial Intelligence In Indonesia. *Law and Justice*, 7(1), 35–45. <https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.760>
- Dyah Permata Sari, N. N. M. (2025). *binar,+6+Fix+Faidah.docx*.
- Dyah, Sari, P., Multisuandi, N. N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Penyunting, A., Usaha, T., Laboratorium, :, Luar, P., Fakultas, S., Pendidikan, I., O-1 Lantai, G., Lidah, J., Sby, W., & Pos, K. (2025). Literasi Digital dalam Pendidikan Non Formal: Peluang. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 9, 47–51. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls>
- Iman Pasu Purba, B. S. W. S. S. (2024). *binar,+29894+\_+Purba*.
- Kasma, U. (n.d.). *Penerapan Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SMA di Era Society 5.0*.
- Mustika, M., & Sari, K. (2020a). Amirotu Dinia. In *Penguatan Literasi Digital Oleh Relawan Teknologi dan Informasi JCMS* (Vol. 5, Number 1). <https://kominfo.go.id>
- Mustika, M., & Sari, K. (2020b). Amirotu Dinia. In *Penguatan Literasi Digital Oleh Relawan Teknologi dan Informasi JCMS* (Vol. 5, Number 1). <https://kominfo.go.id>
- Mutmainnah, A., Suhandi, A. M., & Herlambang, Y. T. (2024a). Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>
- Mutmainnah, A., Suhandi, A. M., & Herlambang, Y. T. (2024b). Problematika Teknologi Deepfake sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 67–72.



- <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>
- Naila, I., Ridlwan, M., & Haq, M. A. (2021). Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 7(2).  
<http://journal.unesa.ac.id/index.php/PPD>
- Ni'mah, N., Fabriar, S. R., Fitri, A. N., & Pangestu, A. C. (2026). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dalam Pemanfaatan Media Digital untuk Informasi dan Promosi. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.30812/adma.v6i2.5281>
- Pendidikan, J., Sekolah, L., Surabaya, U. N., Strategi, D., Dyah, P., Sari, P., Multisuandi, N. N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Penyunting, A., Usaha, T., Laboratorium, :, Luar, P., Fakultas, S., Pendidikan, I., O-1 Lantai, G., Lidah, J., Sby, W., & Pos, K. (2025). Literasi Digital dalam Pendidikan Non Formal: Peluang. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 9, 47–51.  
<https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>
- Puspita, L. (n.d.). *Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyebaran Konten*. (9), 2025.
- Putu, N., Putri, M., Gede, D., Yudiawan, H., Studi, P., & Hukum, I. (n.d.). *ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPPAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*. Retrieved <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Setya Arifina, A., Astuti, D. D., Nur, C., Dinata, F., Prasetyaningrum, W., Lestari, E. P., & Santosa, A. (2024). *Sosialisasi Netiket Guna Meningkatkan Pemahaman Bijak Bermedia Sosial*. 5(1), 271–284.  
<https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3830>
- Suryanti Suryanti, L. W. (2022). *edustreampgsd,+1.+Suryanti\_Literasi +Digital+1-9*.

